

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asumni Mth, "Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam". Jurnal Hukum Islam, Vol 12 No. 4 (2014), hlm. 27.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, hal. 8-12
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafik, 2008, hal. 99
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Penada Media Group, 2015, hlm. 1
- HMA. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2004, hal. 341
- John H. Langbein Dan Lloyd L. Weinreb, "Comparative Criminal Prosedure 'Myth and Reality'", Faculty Scholarship Series, hal. 532
- Komisi Yudisial, *Mengagas Peradilan Etik di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2015.
- Lubis, Surwandi. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta; Sinar Garfika, Tahun 2001
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm16
- Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana 2015), Hlm. 92.
- Santoso, Topo Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas (Bandung: Asy Syamsil Press & Grafika, 2001), h. 59.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986.

Sukanto, Sujono, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983

T.M Hasby As-Shiddieqy, “*Peradilan dan Hukum Acara Islam*”, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang, 1997 hal.73

B. Makalah

Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta,2003, hlm.27-28

C. Jurnal

Ahmad Syarif, Skripsi: “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta*”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), Hal. 26.

Aroma Puspita, Nestiti. “*Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia*” *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Hal. 2

Asumni Mth, “Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No. 4 (2014), h. 27.

Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik POLRI Dalam Menangani Perkara” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.2 Tahun 2016

Dudai, *Jurnal of Human Rights Practice*, 2017, hlm 18

Durahman, Dani “*Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik POLRI Dalam Menangani Perkara*” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.2 Tahun 2016

Gallingging, Ridarson. “*Menelisik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*” *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.11 No.1, Hal.32.

- Hendaryana, Agung “*Memantapkan Profesionalisme POLRI Dibidang Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum*”
Tesis Hukum, Semarang 2010
- Lundu Harapan Situmorang “*Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*” Jurnal, Jakarta, 2016.
- Pidel Kastro Hutapea dan Indra Karianga, *Prinsip Miranda Rules “The Right To Remain Silent” Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Media Iuris Vol. 2 No. 3, Oktober 2019
- Rada, Arifin “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, hal. 32
- Setyowati, H. & Muchiningtias, N. (2018). “*Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia*”, LEX SCIENTIA: Law Review. Volume 2 No. 2, November, hlm. 155-168
- Sunaryo,” *Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Yang Diancam Pidana Lima Tahun Atau Lebih Dalam Proses Penyidikan*”, Tesis Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, 2019.
- Tansefi, Skripsi, “*Efektivitas Pendampingan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Pasal 114 Kuhap Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHAP*” (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). Hal. 35
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syamsil Press & Grafika, 2001), h. 59.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Undang-undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003
- Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak Nomor 11 Tahun 2012.

Indonesia. Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011

Indonesia. Undang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

The Constitution of the United States

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 96 PK/Pid/2016 Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993.

Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998.

Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 545 K/Pid.Sus/2011, tanggal 31 Maret 2011.

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0a29fbf0de1/pentingnya-yurisprudensi-di-mata-ketua-ma-belanda/> diakses pada tanggal 18 Januari 2021